



DINDIKBUD

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2025 - 2029

DINDIKBUD KAB. DEMAK

0291 – 685242 

<https://dindikbud.demakab.go.id/> 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Pendidikan dan kebudayaan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan urusan Pendidikan dan urusan kebudayaan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Demak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Haris Wahyudi Ridwan, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1976006061995011001

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR..... II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 7

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 7

2.1.1. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 32

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 35

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya..... 37

2.2.2.1. Telaahan RPJMN 2025-2029..... 38

2.2.2.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah..... 39

2.2.2.3. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah..... 40

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 42

2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43

2.2.5. Telaahan Dokumen Lainnya 45

2.2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih 46

2.2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48

BAB III UJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 49

3.1. TUJUAN DAN SASARAN 49

3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 53

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 58

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD 58

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025-2030 60

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Mengacu Kepada.....	100
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	101
_Toc216475512	
BAB V PENUTUP	105

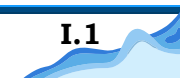
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan 35. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pendidikan dan kebudayaa, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.



Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
18. *Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;*

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor **xx** Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
23. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Kabupaten Demak, tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;

- g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pengadaan dan jabatan, bidang diklat, mutasi, dan dokumentasi, serta bidang kepangkatan, pembinaan, dan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati ;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2.1.1. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;



- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pengadaan dan jabatan, bidang diklat, mutasi, dan dokumentasi, serta bidang kepangkatan, pembinaan, dan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati ;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan



fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak membawahi dan dibantu oleh :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2) Seksi Pendidikan Nonformal (PNF);
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Kebudayaan
dibantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Satuan Pendidikan;

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas dan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,



kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;

- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi 1) Sub Bagian Program, 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai dan melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, serta Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;



- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di bantu oleh 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal (PNF), serta Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) dan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Nonformal (PNF);
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF); dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di

bantu oleh 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Kepala Seksi Pendidikan Nonformal; dan 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di bantu oleh 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Peratama dan 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pembinaan Kebudayaan

Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budaya, Kesenian, serta Sejarah dan Cagar Budaya dan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan



- pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesenian;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sejarah dan Cagar Budaya; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Bidang Pembinaan Kebudayaan di bantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Satuan Pendidikan

Selain unit pelaksana teknis dinas (UPTD), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut berbentuk Satuan Pendidikan Formal Dan Nonformal. Satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Struktur Organisasi

Dasar struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Demak Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disdikbud, yang mengatur pembagian unit kerja seperti Kepala Dinas, Sekretariat, dan Bidang-bidang (misalnya Bidang Pembinaan SD, SMP, Kebudayaan) beserta tugas pokok dan fungsinya, untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan daerah. Struktur ini umumnya mengikuti standar OPD Pemkab dan mencakup:

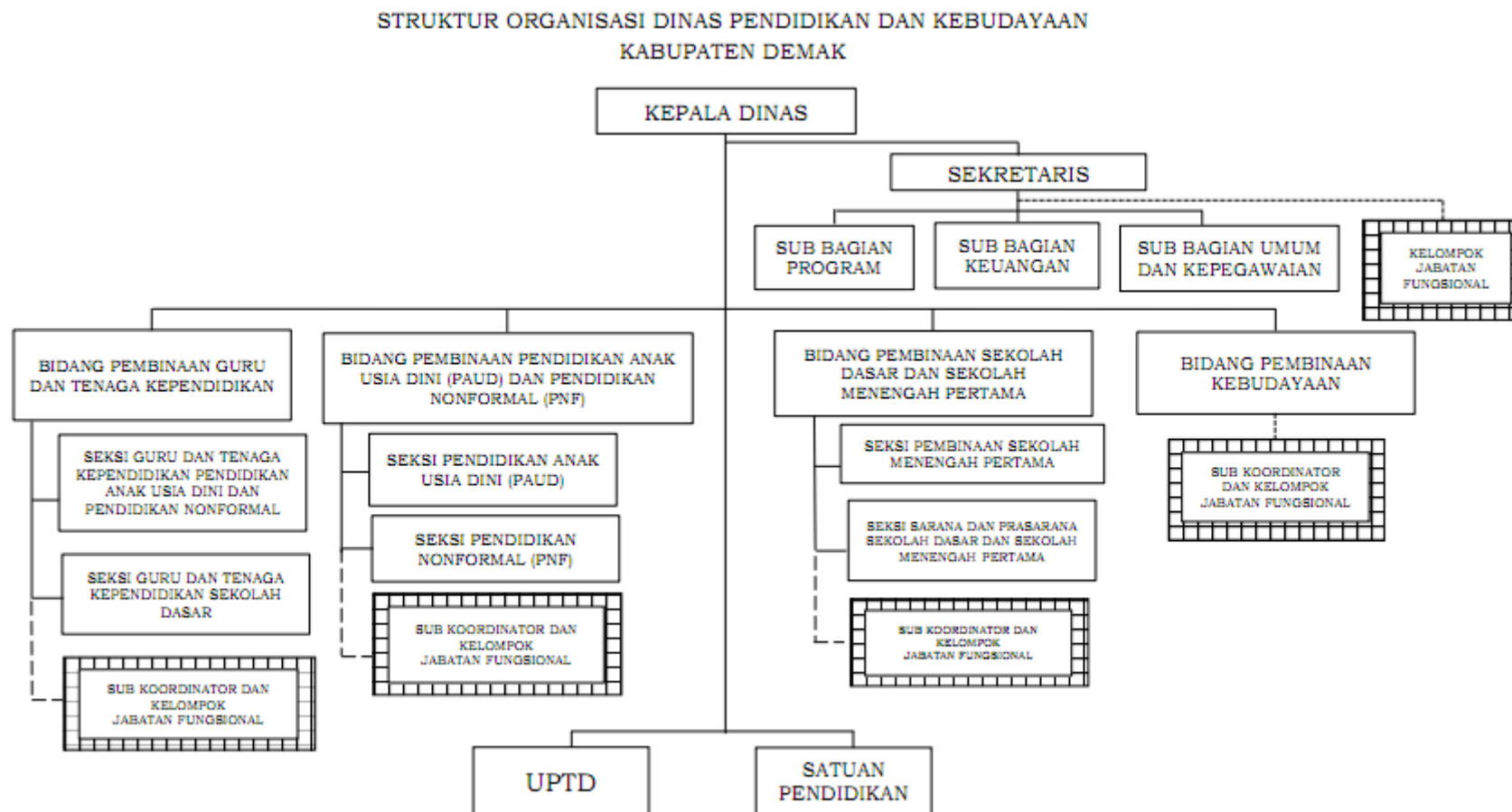
1. **Kepala Dinas:** Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. **Sekretariat:** Menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.
3. **Bidang-bidang:** Biasanya terdiri dari bidang-bidang spesifik seperti:
4. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Kelompok Jabatan Fungsional (KJF):** Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di lapangan.

Tugas dan Fungsi:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (PAUD, Dikdas dan Dikmas) dan kebudayaan.
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Demak.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kebijakan daerah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diklasifikasikan ke dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	2	0	0	0	2
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	8	3	15	7	5	1	39
3	D3	1	1	4	3	0	0	9
4	S1	13	4	7	19	3	3	49
5	S2	6	6	0	0	0	0	12
6	S3	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	28	14	28	29	8	4	111

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas ASN sebanyak 97 orang dan Non ASN sebanyak 14 Orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	8	4	12
2	PPPK	28	29	57
3	PNS Golongan II	9	3	12
4	PNS Golongan III	13	10	23
5	PNS Golongan IV	5	2	7
	Jumlah	63	48	111

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari APBD maupun APBN, dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak /Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,093	1978	Jalan Sultan Trenggono No. 89	Hak Pakai	9/17/2021	53	Gedung Kantor	Pembelian	4.692.000.000	Kantor Dinas Pendidikan Kab. Demak

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1379.5	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.483.784.240
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B		Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	42.534.000
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	51.81	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	22.689.860
4.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	B	21.09	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	180.000.000
5.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	B	40	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.572.000
6.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	816.31	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.700.000
7.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	747.6	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	154.857.470
8.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	B	33.7	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	111.722.140
9.	Taman Permanen	B	129.76	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	210.192.820
10.	Pagar Permanen	B	140.21	Jalan Sultan Trenggono No 89 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	667.059.540

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

a. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka			83,37	84,87	86,37	87,87	89,37	86,99	88,26	93,57	90,42		104,34	103,99	108,34	102,90	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Nilai SAKIP Dindikbud	Nilai			83,09	83,29	83,49	83,69	83,89	82,89	80,60	80,60			99,76	96,77	96,54	0,00	
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	78,26	71,43			66,67	78,26	71,43	0,00	
5	Harapan Lama Sekolah;	Tahun			13,49	13,66	13,83	14,00	14,17	13,33	13,34	13,36	13,37		98,81	97,66	96,60	95,50	
6	Rata-rata lama sekolah	Tahun			7,91	7,96	8,01	8,06	8,11	8,10	8,27	8,28	8,29		102,40	103,89	103,37	102,85	
7	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%			59,71	60,21	60,71	61,21	61,71	80,03	82,31	77,91			134,03	136,70	128,32	0,00	
8	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	%			20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	20,00	40,00	55,56	60,00		100,00	100,00	92,60	75,00	
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	✓		100	100	100	100	100	92,27	79,04	80,19			92,27	79,04	80,19	0,00	

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	✓		100	100	100	100	100	99,53	99,21	99,67			99,53	99,21	99,67	0,00	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	✓		100	100	100	100	100	96,00	98,29	99,20 0			96,00	98,29	99,20	0,00	
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	✓		100	100	100	100	100	60,83	11,59	18,77			60,83	11,59	18,77	0,00	

Keterangan:

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun}} \times 100\%$



b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas....xxx. Hasil interpretasi ini ditunjukkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	762.936.947.829	758.234.906.330	817.575.374.470	826.897.275.835	NA	713.555.715.955	709.879.420.964	799.879.131.436	456.536.154.766	NA	93,53	93,62	97,84	55,21		0,08	0,13
► URUSAN SETIAP OPD	532.659.906.237	542.239.193.237	572.663.224.956	619.967.456.871	NA	494.711.138.056	497.511.683.155	560.709.841.324	363.075.024.073	NA	92,88	91,75	97,91	58,56		0,06	0,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	532.659.906.237	542.239.193.237	572.663.224.956	619.967.456.871	NA	494.711.138.056	497.511.683.155	560.709.841.324	363.075.024.073	NA	92,88	91,75	97,91	58,56		0,06	0,13
► URUSAN PENDIDIKAN	229.002.041.592	213.650.713.093	242.687.149.514	204.825.748.964	NA	217.717.881.749	210.387.372.709	237.183.457.490	92.166.534.577	NA	95,07	98,47	97,73	45,00		0,14	0,13
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.462.041.592	212.557.462.093	241.368.190.946	203.139.730.060	NA	217.210.617.749	209.322.830.769	236.024.572.440	91.889.297.577	NA	95,08	98,48	97,79	45,23		0,14	0,13
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	122.500.000	460.000.000	160.000.000	NA	0	118.422.000	326.845.850	0	NA	0,00	96,67	71,05	0,00		2,76	1,76
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	540.000.000	970.751.000	858.958.568	1.526.018.904	NA	507.264.000	946.119.940	832.039.200	277.237.000	NA	93,94	97,46	96,87	18,17		-0,12	-0,12
► URUSAN KEBUDAYAAN	1.275.000.000	2.345.000.000	2.225.000.000	2.104.070.000	NA	1.126.696.150	1.980.365.100	1.985.832.622	1.294.596.116	NA	88,37	84,45	89,25	61,53		-0,05	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	400.000.000	1.445.000.000	1.160.000.000	1.259.730.000	NA	399.965.000	1.238.746.500	1.143.683.900	1.067.581.116	NA	99,99	85,73	98,59	84,75		-0,20	-0,08
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	125.000.000	160.000.000	200.000.000	181.380.000	NA	124.583.950	158.320.600	198.117.195	3.740.000	NA	99,67	98,95	99,06	2,06		0,25	0,25
PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	750.000.000	740.000.000	865.000.000	662.960.000	NA	602.147.200	583.298.000	644.031.527	223.275.000	NA	80,29	78,82	74,45	33,68		0,17	0,10
JUMLAH TOTAL	762.936.947.829	758.234.906.330	817.575.374.470	826.897.275.835	NA	713.555.715.955	709.879.420.964	799.879.131.436	456.536.154.766	NA	93,53	93,62	97,84	55,21		0,08	0,13



c. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat luas, meliputi Peserta Didik (semua jenjang: PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Masyarakat), Pendidik (Guru, Dosen), Tenaga Kependidikan (Tendik), Lembaga Pendidikan (Sekolah, Sanggar), Keluarga, Masyarakat Umum, serta Pelaku Budaya (Seniman, Budayawan, Pengelola Cagar Budaya), dengan tujuan mencerdaskan bangsa dan melestarikan kebudayaan melalui program seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, bantuan beasiswa, dan pembinaan seni/tradisi.

1). Kelompok Sasaran Utama Bidang Pendidikan:

- a. **Peserta Didik:** Anak usia dini, siswa SD, SMP, SMA/SMK, peserta didik pendidikan nonformal (PKBM, LKP), putus sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan.
- b. **Pendidik (Guru):** Guru PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, guru nonformal, yang membutuhkan pembinaan, peningkatan kompetensi (sertifikasi, pelatihan), kenaikan pangkat, dan kesejahteraan (TPG, TPP).
- c. **Tenaga Kependidikan (Tendik):** Staf sekolah, pengawas sekolah, yang membutuhkan pembinaan, mutasi, kenaikan pangkat, dan kesejahteraan.
- d. **Lembaga Pendidikan:** Sekolah negeri/swasta, PAUD, Sanggar, PKBM, LKP, yang membutuhkan pembinaan manajemen, sarana prasarana, dan perizinan.
- e. **Orang Tua/Wali Murid:** Terkait informasi pendidikan, program parenting, dan partisipasi dalam pendidikan anak.

2). Kelompok Sasaran Utama Bidang Kebudayaan:

- a. **Seniman dan Budayawan:** Pelaku seni (tari, musik, teater, rupa, dll.) yang membutuhkan pembinaan, pendanaan, dan fasilitas pengembangan.
- b. **Komunitas dan Lembaga Budaya:** Kelompok-kelompok adat, sanggar seni, pegiat cagar budaya, yang membutuhkan perlindungan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan.

- c. **Masyarakat Umum:** Untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan apresiasi terhadap seni, tradisi, serta nilai-nilai budaya lokal.
- d. **Pengelola Cagar Budaya:** Pemilik atau pengelola situs/benda cagar budaya yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan.

3). Sasaran Pendukung & Stakeholder:

- a. **Pemerintah Daerah Lain:** Untuk koordinasi dan sinergi pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- b. **Instansi Vertikal:** Terkait kebijakan pendidikan dan kebudayaan pusat.
- c. **Dunia Usaha (CSR):** Untuk dukungan pembiayaan program pendidikan dan kebudayaan.

Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

d. Mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemberian Pelayanan.

Mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dalam pelayanan mencakup berbagai pihak seperti **organisasi profesi guru** (PGRI, PGSI, IGTKI, HIMPAUDI) untuk PAUD, **sekolah inti dan sekolah mitra** untuk pemerataan mutu, **Dewan Pendidikan** untuk pengawasan, **BPMP** (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk kemitraan strategis, **orang tua/masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM)** pendidikan, **dunia usaha dan industri (DUDI)**, serta **pemerintah pusat/provinsi** melalui program seperti Merdeka Belajar, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses layanan pendidikan bagi semua.

Jenis-jenis Mitra Dindikbud dalam Pelayanan:

1) Organisasi Profesi dan Lembaga Terkait Pendidikan:

- **IGTKI & Himpaudi:** Mitra utama untuk pengembangan dan kualitas guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) formal dan non-formal.
- **Dewan Pendidikan:** Lembaga independen yang memberikan masukan dan pengawasan mutu layanan pendidikan di daerah.

- **PGRI** adalah singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi profesi yang menyatukan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, berdiri pada 25 November 1945 sebagai wujud perjuangan guru dalam membangun bangsa melalui pendidikan, dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Guru Nasional. PGRI berperan penting dalam memperjuangkan hak guru, meningkatkan mutu pendidikan, dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - **BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan):** Mitra strategis dalam implementasi kebijakan dan penjaminan mutu pendidikan.
- 2) **Satuan Pendidikan dan Guru (Kemitraan GTK):**
- **Sekolah Inti & Sekolah Mitra:** Guru inti berbagi praktik baik dengan guru mitra dari daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) untuk pemerataan mutu guru.
- 3) **Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah:**
- **Pemerintah Daerah Lain & Provinsi:** Berkolaborasi dalam kebijakan dan program pendidikan.
 - **LSM Pendidikan & Komunitas:** Terlibat dalam penguatan program dan layanan pendidikan.
- 4) **Dunia Usaha dan Industri (DUDI):**
- Mitra penting dalam pendidikan kejuruan untuk penyelarasan kurikulum dan program praktik kerja siswa/magang.
- 5) **Masyarakat dan Orang Tua:**
- Berperan dalam pengawasan, dukungan, dan partisipasi dalam pengembangan pendidikan anak.

Peran Mitra dalam Pelayanan:

- **Peningkatan Kualitas Guru:** Berbagi praktik baik, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.
- **Pemerataan Mutu Pendidikan:** Mengatasi ketimpangan kualitas layanan antardaerah.
- **Pengembangan Kurikulum dan Program:** Memberikan masukan untuk kebijakan pendidikan daerah.
- **Penjaminan Mutu:** Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan pendidikan.

- **Dukungan Kebijakan:** Mendorong program-program nasional seperti Merdeka Belajar.

Secara umum, kemitraan ini membantu Dindikbud dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan serta meningkatkan kualitas layanan dasar pendidikan di daerah.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (belum ada)

Pada bagian ini dijelaskan BUMD yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam pencapaian tugas fungsi Perangkat Daerah. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan peran Perangkat Daerah.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mencakup bidang pendidikan (PAUD, dasar, menengah, nonformal) dan kebudayaan, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengembangan SDM, serta mengikutsertakan masyarakat melalui kerja sama dengan daerah lain, lembaga terkait, atau sektor swasta untuk peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pelestarian budaya, seperti dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, hingga penyelenggaraan acara budaya bersama.

Fokus Utama Kerja Sama Disdikbud:

1. Pengembangan Pendidikan:

- Peningkatan Kualitas: Kerja sama untuk berbagi praktik baik dalam manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, dan metode pengajaran.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pelatihan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, serta program pengembangan profesi.
- Infrastruktur: Kerja sama untuk pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah atau perpustakaan.
- Pendidikan Nonformal & Anak Usia Dini: Program kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan PAUD.

2. Pengembangan Kebudayaan:

- Pelestarian Budaya: Kerja sama untuk promosi, pelestarian, dan pengembangan warisan budaya daerah.
- Pariwisata Budaya: Sinergi dengan sektor pariwisata untuk pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis budaya.
- Seni dan Tradisi: Penyelenggaraan festival, pertunjukan, atau program kebudayaan bersama antar daerah.

3. Peningkatan Pelayanan Publik:

- E-Government: Implementasi sistem digital untuk administrasi pendidikan dan kebudayaan.
- Kesehatan: Sinergi dengan Dinas Kesehatan dalam program kesehatan sekolah.
- Pihak yang Diajak Kerja Sama:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah lain (lintas kabupaten/provinsi).
- Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek/Kemdikdasmen) melakukan kerjasama backbone terutama untuk memperkuat infrastruktur digital dan integrasi data pendidikan, memanfaatkan infrastruktur PDN (Penyelenggara Data Nasional) sebagai tulang punggung, serta memastikan kualitas data seperti Dapodik untuk layanan pendidikan yang lebih baik melalui validasi data dan pengembangan sistem, sering kali berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan transformasi digital pendidikan.
- Lembaga pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Vokasi).
- Sektor Swasta dan Dunia Usaha (CSR, sponsorship).
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Budaya.

g. Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Inovasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kami melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Terintegrasi Berbasis Digital. Inovasi ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru secara manual, seperti

potensi manipulasi data, keterlambatan informasi, dan kesulitan dalam pengawasan.

Sistem ini dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat melalui portal daring, yang memungkinkan calon peserta didik dan orang tua untuk melakukan pendaftaran, verifikasi berkas, pemilihan jalur masuk (*domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi*), serta melihat hasil seleksi secara real time.

Fitur-fitur unggulan dalam sistem ini meliputi : Verifikasi Otomatis data calon siswa melalui integrasi dengan Dukcapil (data NIK, Nama, Nama Orang Tua, dan Alamat). Pemetaan Domisili Otomatis berbasis GIS (*Geographic Information System*). Dashboard Monitoring untuk pihak sekolah dan Dinas Pendidikan guna memantau perkembangan pendaftaran secara langsung. Notifikasi Digital melalui email atau Whatsapp untuk pengumuman hasil seleksi. Fitur Aduan Masyarakat yang memungkinkan transparansi dan partisipasi publik.

Hasil dari penerapan sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal efisiensi waktu, akurasi data, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses Sistem Penerimaan Murid Baru.. dan hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru terintegrasi dengan data pokok pendidikan. Selain itu, potensi kecurangan dapat diminimalisir, dan proses seleksi menjadi lebih objektif, adil, dan tidak diskriminasi.

Inovasi ini juga mendukung implementasi program digitalisasi pendidikan sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta menjadi praktik baik dalam tata kelola pendidikan yang bersih dan berorientasi layanan publik. oleh Perangkat Daerah dalam periode lalu dengan penjelasan status aktif sampai sekarang masih digunakan, Tahun lalu bernama PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan mulai tahun 2025 menjadi SPMB (*Sistem Penerimaan Murid Baru*).

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah. Pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihadapkan pada **tantangan** seperti kesenjangan

kualitas/akses, keterbatasan sarpras, beban administrasi guru, perubahan kurikulum, kesejahteraan guru, tantangan digitalisasi, dan masalah sosial (disiplin/kemiskinan). Namun, ada **peluang** besar dalam pemanfaatan teknologi (pembelajaran digital, administrasi), peningkatan mutu SDM (guru), penguatan kemitraan, pengembangan pendidikan karakter & kebudayaan, serta program pendidikan gratis untuk pemerataan akses, yang semuanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. **Kesenjangan dan Kualitas Pendidikan:** Jurang antara daerah perkotaan dan pedesaan (terpencil), serta kurangnya guru berkualitas di daerah minim fasilitas.
2. **SDM Guru:** Beban administratif berat, kesejahteraan belum optimal, serta tuntutan kompetensi baru (digital).
3. **Infrastruktur & Sarana:** Keterbatasan fasilitas penunjang belajar mengajar di banyak sekolah.
4. **Kurikulum:** Perubahan kurikulum yang cepat menuntut adaptasi berkelanjutan.
5. **Teknologi:** Tantangan implementasi pembelajaran digital dan manajemen berbasis teknologi.
6. **Manajemen & Keuangan:** Keterbatasan anggaran dan tantangan kepemimpinan efektif.
7. **Tuntutan Masyarakat:** Ekspektasi tinggi orang tua dan masyarakat terhadap hasil pendidikan.
8. **Budaya Melayani:** Mengubah paradigma birokrasi menjadi budaya yang berfokus pada pelayanan publik yang prima dan akuntabel merupakan tantangan internal tersendiri.

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja

Perangkat Daerah. Peluang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

1. **Digitalisasi Pendidikan:** Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, administrasi daring (e-learning, manajemen sekolah), dan peningkatan literasi digital.
2. **Pengembangan SDM:** Pelatihan guru berbasis digital, peningkatan kompetensi profesional, dan peningkatan kesejahteraan.
3. **Penguatan Pendidikan Karakter & Budaya:** Integrasi nilai kebudayaan lokal dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa.
4. **Akses Pendidikan Merata:** Program pendidikan gratis dan inovasi layanan untuk menjangkau masyarakat miskin dan terpencil.
5. **Kemitraan & Kolaborasi:** Sinergi dengan dunia usaha/industri (DUDI), komite sekolah, dan masyarakat.
6. **Efisiensi Pelayanan:** Peningkatan pelayanan publik melalui inovasi birokrasi dan transparansi (misal: PPID, layanan perizinan daring).
7. **Otonomi Daerah:** Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan dan kebudayaan memberikan fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan dan program yang relevan dengan konteks lokal.
8. **Pemanfaatan Potensi Lokal:** Mengangkat dan melestarikan budaya serta situs/benda cagar budaya lokal dapat menjadi bagian integral dari pelayanan dinas, membangun kesadaran masyarakat dan memperkaya materi pendidikan

Strategi Pengembangan (Implikasi)

- Fokus pada **pembelajaran adaptif** dan **fleksibel** (blended learning).
- Pemberdayaan **guru penggerak** dan **kepemimpinan sekolah yang kuat**.
- Investasi pada **infrastruktur digital** dan **peningkatan kualitas guru** di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
- Penguatan fungsi **Dinas Pendidikan** sebagai fasilitator dan regulator yang responsif terhadap kebutuhan lapangan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan dirumuskan dari data-data pada subbab sebelumnya, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, dan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yaitu: “berpusat pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, pengembangan SDM guru, infrastruktur sekolah yang memadai, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, yang diidentifikasi dari dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) untuk menjawab tantangan visi-misi daerah, standar nasional, dan isu strategis seperti kesenjangan kualitas antara perkotaan dan perdesaan, peningkatan kompetensi guru seiring era digital, serta penguatan identitas budaya Demak yang adiluhung”, Permasalahan pendidikan di Kabupaten Demak meliputi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) karena faktor ekonomi dan lainnya, kualitas guru/tenaga pendidik, serta infrastruktur/sarana prasarana, dengan akar masalah yang meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, kesejahteraan guru yang belum optimal, dan implementasi kebijakan yang perlu diperkuat untuk memastikan pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh warga Demak.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak”

Permasalahan	Akar Permasalahan
Anak Tidak Sekolah (ATS) Tinggi	1. Ekonomi Keluarga: Kemiskinan membuat keluarga tidak mampu membiayai sekolah.
	2. Faktor Lain: Bukan hanya ekonomi, bisa jadi karena kurangnya kesadaran, lingkungan, atau masalah keluarga.
Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik (Guru/Tendik) Kurang Optimal.	1. Kapasitas Tenaga Pendidik: Belum memadai, perlu peningkatan kapasitas.
	2. Kesejahteraan Guru: Belum terjamin sepenuhnya, mempengaruhi motivasi kerja.
Akses dan Mutu Pendidikan Belum Merata.	1. Infrastruktur: Sarana prasarana sekolah masih kurang memadai (ruang kelas, fasilitas).
	2. Kebijakan: Implementasi program peningkatan akses (beasiswa miskin, literasi) perlu dipercepat.
Rendahnya Keterampilan & Relevansi Pendidikan.	1. Kurikulum & Pembelajaran: Relevansi dengan kebutuhan pasar kerja/hidup masih perlu ditingkatkan.
	2. Faktor Iptek & Lingkungan: Pengaruh perkembangan teknologi dan lingkungan sosial yang kurang kondusif.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dirincikan sebagai berikut :



Akar Permasalahan Utama:

1. Anak Tidak Sekolah (ATS):

- **Faktor Ekonomi:** Kemiskinan menjadi penyebab utama anak putus sekolah atau tidak sekolah.
- **Kesadaran Pendidikan:** Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal.
- **Faktor Lain:** Selain ekonomi, ada faktor-faktor lain seperti sosial dan aksesibilitas.

2. Kualitas dan Akses Pendidikan:

- **Kapasitas Pendidik:** Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan masih menjadi fokus.
- **Literasi:** Tantangan dalam literasi berbasis inklusi sosial.
- **Beasiswa:** Kebutuhan akan program beasiswa bagi siswa miskin.

3. Tantangan Sinergi dan Kolaborasi:

- Permasalahan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh Dindikbud sendiri, butuh **kerja sama lintas OPD** (Bappelitbangda, Dinpermades P2KB, Dinkominfo, Kemenag) dan elemen masyarakat untuk penanganan komprehensif.

Solusi yang Diupayakan :

- **Pendekatan Holistik:** Menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan keagamaan (pesantren, Madrasah Diniyah).
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Mengatasi akar masalah ekonomi keluarga.
- **Program Prioritas:** Implementasi program prioritas Bupati seperti beasiswa, literasi, dan peningkatan kapasitas guru.

Jadi, akar masalahnya terletak pada keterkaitan antara faktor sosial-ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kebutuhan akan kolaborasi strategis antar lembaga untuk memastikan setiap anak di Demak mendapatkan pendidikan yang layak.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

Telaahan dokumen lain dalam Renstra (Rencana Strategis) adalah proses analisis dan penyelarasan dokumen perencanaan tingkat daerah (RPJMD), dokumen perencanaan tingkat instansi yang lebih tinggi (Renstra Provinsi/Nasional), serta peraturan perundang-undangan terkait (UU, PP, Perda) untuk memastikan Renstra suatu Perangkat Daerah (SKPD)

konsisten, selaras, dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, meliputi landasan hukum, tugas fungsi, visi-misi, serta target kinerja, menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dokumen Utama yang Ditelaah

1. **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional):** Dokumen Perencanaan Nasional tingkat Nasional yang menjadi pedoman pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. **RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah):** Dokumen perencanaan daerah tingkat kabupaten/kota yang menjadi pedoman utama bagi SKPD dalam menyusun Renstranya.
3. **Renstra Provinsi/Nasional:** Dokumen strategis yang lebih tinggi untuk memastikan keselarasan dengan visi pembangunan di tingkat provinsi atau nasional.
4. **Peraturan Perundang-undangan:** Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemerintahan, struktur, tugas, fungsi, serta manajemen kinerja PNS.
5. **Dokumen SKPD Lain:** Profil SKPD, Renstra SKPD lain yang terkait, atau laporan evaluasi kinerja sebelumnya untuk memastikan kesinambungan.

2.2.2.1. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini juga dijelaskan program-program dalam RPJMN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'**. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

2.2.2.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen 2025-2029 menunjukkan dokumen ini menjadi landasan transformasi pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045, fokus pada manusia unggul dengan mengimplementasikan kebijakan kurikulum (Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 tetap berjalan), penguatan mutu, dan anggaran yang lebih efisien, serta menetapkan arah strategis baru setelah pemisahan menjadi dua kementerian (Kemendikdasmen).

Telaah Renstra Kemendikdasmen 2025-2029:

1. **Landasan Visi:** Mendukung visi besar RPJPN 2025–2045, yaitu "Indonesia Emas 2045 – Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".
2. **Fokus Utama:** Menciptakan manusia Indonesia unggul melalui pendidikan dasar dan menengah sebagai tulang punggung transformasi sosial.

3. **Konteks Kebijakan:**

- a. **Pemisahan Kementerian:** Renstra ini disusun setelah adanya pemisahan dari Kemendikbudristek, membentuk Kemendikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Kemdiktisaintek (Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
- b. **Kurikulum:** Tetap mengacu pada Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025, yang menegaskan penggunaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 secara berdampingan untuk tahun ajaran 2025/2026.

4. **Aspek Strategis:**

- a. **Kurikulum Merdeka:** Penguatan implementasi, termasuk struktur kurikulum, kegiatan kokurikuler, muatan pembelajaran, beban belajar, dan ekstrakurikuler.
- b. **Arah Kebijakan:** Meliputi peningkatan mutu, pemerataan akses, dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

5. **Dokumen Pendukung:**

- a. **Peraturan Menteri:** Ditetapkan melalui Permendikdasmen No. 19 Tahun 2025, yang mencabut peraturan sebelumnya terkait Renstra.
- b. **Sistem Informasi:** Mengintegrasikan data kinerja melalui Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Siklon-RKA).

Kesimpulan Telaah:

- Renstra ini adalah dokumen strategis jangka menengah yang mengarahkan pembangunan pendidikan dasar dan menengah menuju SDM unggul.
- Meskipun ada pemisahan kementerian, prinsip Kurikulum Merdeka tetap dipertahankan dan diperkuat.
- Fokusnya jelas pada peningkatan kualitas lulusan melalui kebijakan kurikulum yang terperinci dan didukung oleh kerangka anggaran yang terencana.

2.2.2.3. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Jateng,

selaras dengan RPJMD Provinsi dan kebijakan nasional (seperti Peta Jalan Pendidikan 2025-2045), fokus utamanya adalah peningkatan akses, kualitas, pemerataan, serta pengembangan kebudayaan, dengan program konkret seperti BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk SMA/SMK/SLB dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) untuk sekolah swasta di Jawa Tengah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tujuan Utama Telaahan Renstra:

- Menjadi panduan strategis untuk Disdikbud Jateng dalam 5 tahun ke depan.
- Mencapai target pembangunan pendidikan dan kebudayaan daerah yang selaras dengan program nasional.

Komponen Kunci dalam Renstra:

- **Analisis Situasi:** Membahas kondisi umum pendidikan dan kebudayaan di Jateng, termasuk capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS).
- **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran:** Menetapkan arah kebijakan jangka menengah.
- **Program dan Kegiatan:** Menjelaskan langkah-langkah konkret, seperti penyaluran bantuan (BOP, BOSDA) dan program pembinaan.
- **Indikator Kinerja:** Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Berdasarkan konteks perencanaan yang ada, isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam Renstra Disdikbud Jateng 2025-2029 meliputi:

- **Peningkatan Mutu Pendidikan:** Ini merupakan sasaran utama yang sering diukur melalui Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rapor Pendidikan. Program yang terkait biasanya mencakup peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran.
- **Pemerataan Akses:** Fokus untuk memastikan akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Jawa Tengah, termasuk daerah terpencil, untuk mencapai target Wajib Belajar 13 tahun (hingga SMA/SMK).
- **Revitalisasi Kebudayaan:** Mengingat nomenklatur dinas juga mencakup kebudayaan, program pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan menjadi bagian integral dari rencana strategis tersebut.

- **Tata Kelola dan Efisiensi Anggaran:** Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan sumber anggaran yang jelas, termasuk kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak 2025-2029 (yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029) fokus pada peningkatan kesejahteraan, termasuk sektor pendidikan dan kebudayaan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan cagar budaya seperti Masjid Agung Demak dan situs-situs sejarah, serta pelestarian tradisi lokal (Grebeg Besar) sebagai bagian dari identitas kultural yang menopang pariwisata, meskipun tantangan seperti rob dan perluasan wilayah perlu diatasi agar pembangunan berjalan terarah sesuai RTRW, dapat dilihat sebagai berikut :

Pendidikan dalam RTRW/RPJMD 2025-2029:

- **Tujuan:** Mewujudkan Demak Cerdas, Maju, Religius, Berkeadilan, dan Sejahtera (DDCMRBS).
- **Fokus :**
 - Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Pengembangan infrastruktur sekolah (PAUD, SD, SMP dan DIKMAS), peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi pendidikan.

- Pendidikan Karakter dan Keagamaan: Penguatan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam kurikulum.
- Pengembangan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS): Menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri lokal, termasuk sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Kebudayaan dalam RTRW/RPJMD 2025-2029:

- **Tujuan:** Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya serta potensi pariwisata berbasis budaya.
- **Fokus:**
 - **Cagar Budaya:** Perlindungan dan revitalisasi situs bersejarah (Masjid Agung Demak, makam Sunan Kalijaga, dan lain-lain.) sebagai destinasi wisata religi.
 - **Tradisi Lokal:** Pengembangan dan promosi tradisi unik seperti Grebeg Besar untuk memperkuat identitas budaya dan daya tarik wisata.
 - **Pariwisata Religi:** Mengembangkan Demak sebagai destinasi ziarah utama di Jawa Tengah, mengintegrasikan aspek pendidikan sejarah dan budaya.

Keterkaitan dan Tantangan:

- **Integrasi:** Pendidikan dan kebudayaan menjadi pilar penting dalam visi pembangunan Demak, dengan penekanan pada penguatan SDM yang berbudaya dan berkarakter.
- **Tantangan:** Masalah rob dan perluasan kawasan permukiman membutuhkan pengaturan tata ruang yang ketat agar tidak mengancam situs budaya dan lahan pendidikan, serta memastikan pembangunan infrastruktur tidak sporadis, sesuai amanat peraturan bupati.

Secara keseluruhan, RTRW/RPJMD Demak 2025-2029 menempatkan pendidikan dan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan, memadukan nilai-nilai Islam, sejarah, dan kearifan lokal Jawa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan destinasi wisata yang khas.

2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan

hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak umumnya berkisar pada integrasi pembangunan berkelanjutan (pendidikan hijau, budaya lestari) ke dalam program dinas, tantangan keterbatasan anggaran/SDM untuk implementasi KLHS, isu pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal yang terancam pembangunan, serta peran Dinas dalam mendidik masyarakat tentang isu lingkungan dan budaya untuk mencapai tujuan pembangunan Demak yang selaras dengan prinsip KLHS, seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

Tabel 3.2
Tema Isu KLHS terhadap Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Integrasi pembangunan berkelanjutan (pendidikan hijau, budaya lestari)	1. Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum: Bagaimana Dinas Pendidikan memasukkan materi KLHS (perubahan iklim, konservasi, dll.) ke sekolah-sekolah (SD/SMP) agar siswa sadar lingkungan sejak dini;
	2. Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya: Tantangan ketersediaan anggaran dan SDM di Dinas Pendidikan untuk menyusun dan melaksanakan program yang berbasis KLHS, serta koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup;
	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan: Isu konflik antara pembangunan infrastruktur (sekolah baru, dan lain-lain.) dengan situs cagar budaya atau tradisi lokal Demak (misal: Grebeg Besar, Sedekah Bumi), dan peran Dinas dalam menjaga keseimbangan.

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	4. Penguatan Peran Budaya dalam Pariwisata Berkelanjutan: Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pengembangan wisata religi dan budaya Demak (seperti Masjid Agung Demak) dengan tetap menjaga nilai lingkungan dan sosial, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah. 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Peran Dinas dalam mendorong kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan budaya tentang pentingnya menjaga lingkungan dan warisan Demak

Tabel 3.3
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

2.2.5. Telaahan Dokumen Lainnya

...



2.2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan misi **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak**, pada Tujuan 1 Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional dan Tujuan 2 : Memajukan Kebudayaan Daerah dengan sasaran Sasaran 1.1: Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan; Sasaran 1.2: Meningkatnya Mutu Pembelajaran; Sasaran 1.3: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Sasaran 2 : Melestarikan kebudayaan daerah; Indikator yang diacu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

Indikator Tujuan :

1. Literasi Membaca SD/Sederajat*
2. Literasi Membaca SMP/Sederajat*
3. Numerasi SD/Sederajat*
4. Numerasi SMP/Sederajat*
5. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan;

Indikator Sasaran :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun;
3. Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B;
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
5. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati-Wabup Demak 2025-2030 (Bupati Eisti'anah & M. Badruddin) menunjukkan fokus kuat pada peningkatan SDM dan karakter melalui program "Demak Cerdas dan Berkarakter", didukung program "Demak Religius" (kesejahteraan guru madin/TPQ), serta ekonomi lokal ("Demak Produktif"), tata kelola ("Demak Smart Governance"), infrastruktur ("Demak Mantap"), dan ketahanan sosial ("Demak Tangguh"). Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ini berarti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan karakter siswa/generasi muda, serta pemberdayaan guru agama/keagamaan, sejalan dengan misi meningkatkan SDM berdaya saing dan berakhlak.

Visi & Misi

1. **Visi:** "Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera".
2. **Misi:**
 1. Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing dan berakhlak.
 2. Mengembangkan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
 3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
 4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas.
 5. Memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan.

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. **Demak Cerdas dan Berkarakter:** Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah formal) dan pengembangan karakter religius & nasionalis.
2. **Demak Mantap:** Pembangunan/perbaikan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan (sekolah) dan Pengembangan Fasilitas Pendidikan - Demak Cerdas
3. **Demak Tangguh dan Lestari:** Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi.

Arah Kebijakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)

- **Fokus Pendidikan:** Tidak hanya akademis, tapi juga karakter dan akhlak (religius), sesuai misi peningkatan SDM.
- **Dukungan Guru:** Peningkatan kesejahteraan guru agama menjadi prioritas, menunjukkan komitmen pada pendidikan non-formal dan karakter.
- **Infrastruktur Sekolah:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak akan bersinergi dalam program perbaikan sarana prasarana sekolah ("Demak Mantap").
- **Integrasi Program:** Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak harus selaras dengan semua misi, dari SDM hingga ketahanan sosial, karena pendidikan adalah kunci utama pembangunan manusia.

2.2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Isu Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Ketersediaan satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS hingga SMA/SMK. 2. SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup besar. 3. Warisan budaya, situs sejarah, serta komunitas pelaku seni lokal. 4. Dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.	1. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. 2. Keterbatasan sarana prasarana belajar, termasuk digitalisasi sekolah. 3. Mutu dan distribusi guru yang belum merata. 4. Lemahnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah. 5. Rendahnya literasi, numerasi, dan karakter peserta didik.	1. Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah. 2. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas satuan pendidikan. 3. Pengembangan kurikulum daerah dan pelestarian budaya lokal. 4. Pengembangan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah. 5. Digitalisasi pembelajaran dan manajemen pendidikan.	1. Transformasi digital di sektor pendidikan. 2. Kebutuhan kompetensi abad 21 dan karakter global	1. Implementasi Kurikulum Merdeka. 2. Peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. 3. Penguatan data pendidikan dan kebudayaan	1. Perubahan demografi peserta didik. 2. Persaingan kompetensi di tingkat Jawa Tengah. 3. Tuntutan peningkatan layanan publik pendidikan	1. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kompetensi dan distribusi guru. 3. Modernisasi sarpras pendidikan, termasuk TIK. 4. Penguatan budaya, pelestarian situs dan tradisi lokal. 5. Tata kelola pendidikan yang transparan dan berintegritas .

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan 1 : Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional
- ❖ Tujuan 2 : Memajukan Kebudayaan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- Sasaran 1.1 : Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan;
- Sasaran 1.2 : Meningkatkan Mutu Pembelajaran;
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sasaran 2 : Melestarikan kebudayaan daerah;

Dalam rangka mencapai Sasaran, dalam pencapaian tujuan dan sasaran ditentukan indikator sebagai berikut adalah :



Indikator Tujuan :

1. Literasi Membaca SD/Sederajat*
2. Literasi Membaca SMP/Sederajat*
3. Numerasi SD/Sederajat*
4. Numerasi SMP/Sederajat*
5. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan;

Indikator Sasaran :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun;
3. Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B;
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
5. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah;

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN					Keterangan
							PADA TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat			Rata-Rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9,37	9,50	9,64	9,77	9,91	10,04	
			Harapan Lama Sekolah*	Tahun	13,36	14,00	14,17	14,27	14,37	14,47	14,57	
	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional		Literasi Membaca SD/Sederajat*	%	85,53	87,08	87,86	88,63	89,41	90,18	90,96	
			Literasi Membaca SMP/Sederajat*	%	78,62	81,26	82,58	83,9	85,22	86,54	87,86	
			Numerasi SD/Sederajat*	%	78,82	82,68	84,6	86,52	88,44	90,37	92,29	
			Numerasi SMP/Sederajat*	%	74,42	78,49	80,53	82,56	84,6	86,63	88,67	
		Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun	%	91,08	92,92	93,42	93,92	94,42	94,92	95,42	
			Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun	%	74,69	77,19	77,69	78,19	78,69	79,19	79,69	
		Meningkatnya Mutu Pembelajaran	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	82,31	82,81	83,31	83,81	84,31	84,81	85,31	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,53	85,71	86,04	86,55	87,06	87,57	88,08	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN					Keterangan
							PADA TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indeks Pelayanan Publik PD	Angka	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	
meningkatnya pemajuan kebudayaan			Nilai kinerja Kebudayaan	%	57,78	58,28	58,88	59,43	59,98	60,53	61,08	
	Memajukan Kebudayaan Daerah		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	60	61	62	63	64	65	66	
		Melestarikan kebudayaan daerah	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	60	61	62	63	64	65	66	

Keterangan :

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.

Tahapan Strategi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;	- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;	- Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;	- Percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;	- Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;
- Menyusun kerangka regulasi	- Menerapkan prinsip-	- Memastikan prinsip-prinsip	- Menggunakan teknologi	- Terwujudnya pelayanan



Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
dan kebijakan, membangun kapasitas institusi, dan menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola yang baik;	prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dalam setiap proses birokrasi	tata kelola yang baik terinternalisasi dan menjadi bagian dari budaya kerja aparatur pemerintah	informasi dan inovasi untuk mempercepat penyampaian layanan publik dan meningkatkan efisiensi	publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta terwujudnya kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak	- Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak	- Pemantapan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak	- Percepatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak	- Perwujudan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak
- Membangun dasar yang kuat dan fundamental	- Memperkaya dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan	- Memperkuat dan menanamkan nilai-nilai dan etos kerja	- Mempercepat akselerasi pencapaian standar unggul	- Mewujudkan SDM berkualitas menjadi aset strategis
- Pengembangan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif	- Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif	- Percepatan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif	- Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif
- Membangun fondasi pendidikan yang kuat dan akses yang lebih luas.	- Meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan;	- Menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan;	- Mempercepat dampak pendidikan terhadap kesejahteraan	- Mencapai kesejahteraan masyarakat melalui hasil pendidikan



3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.3.

Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025-2029

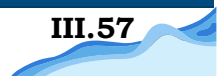
No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas		1. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik	
			2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;	
			3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah;	
			4. Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah;	
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak		1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;	
			2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin Daerah kepada Anak dari Keluarga Tidak Mampu;	
			3. Pemberian Beasiswa untuk siswa berprestasi;	
			4. Peningkatan tata kelola satuan Pendidikan;	
			5. Peningkatan peran serta orang tua, masyarakat dan mitra Dindikbud dalam pendidikan;	
			6. Peningkatan kualitas proses dan evaluasi pembelajaran pada jenjang Paud,	



Bab 3 Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal; 7. Peningkatan Pendidikan Karakter; 8. Peningkatan budaya literasi; 9. Peningkatan Minat, bakat dan kreatifitas siswa;	
			10. Peningkatan kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 11. Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 12. Pemetaan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara merata;	
3	mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan ketahanan sosial yang inklusif	Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan	1. Peningkatan SDM Pengelola dan Masyarakat Peduli Warisan Budaya Benda; 2. Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB Kab. Demak) ; 3. Peningkatan Kajian Warisan Budaya Benda; 4. Penetapan warisan budaya benda yang dilindungi (dicatat) dengan SK Bupati dan Pencatatan Warisan budaya di Kementerian Kebudayaan; 5. Peningkatan Pengelolaan Sarpras Museum;	
			7. Peningkatan SDM Pengelola dan Masyarakat Peduli Warisan Budaya Tak Benda; 8. Peningkatan Kajian Warisan Budaya Tak Benda; 9. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda yang dilingungi (dicatat) dengan SK Bupati dan Pencatatan Warisan budaya di Kementerian Kebudayaan; 10. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda; 11. Peningkatan Sarpras bereksprei seniman;	





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas ...xxx untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Pendidikan dan Kebudayaan. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Demak Cerdas dan Berkarakter dengan program Prioritas sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (melalui Pelatihan dan Transformasi Digital);
 - b. Peningkatan Sarana & Prasarana Teknologi Informasi Sekolah;
 - c. Sekolah Unggulan sebagai Model Pendidikan Berkualitas;
 - d. Program Apresiasi "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi;
 - e. Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter di Sekolah;

2. Program Prioritas Demak Mantap dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Fasilitas Pendidikan - Demak Cerdas;
3. Program Prioritas Demak Tangguh dan Lestari dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi;

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1



Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2030

2025-09-01

NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PP.1	Demak Cerdas dan Berkarakter															
KP. 1	Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (melalui Pelatihan dan Transformasi Digital)	jumlah guru yang mengikuti pendidikan karakter, etika profesi dan transformasi digital	guru		100		100		100		100		100			
	AP 1. Pendidikan Karakter, Etika Profesi dan transformasi digital	- jumlah penyelenggaraan pendidikan karakter, etika profesi dan transformasi digital bagi guru SD	kegiatan		1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		- jumlah penyelenggaraan pendidikan karakter , etika profesi dan transformasi digital bagi guru SMP	kegiatan			-	1	50.000.000	1	50.000.000		-	1	50.000.000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- jumlah penyelenggaraan pendidikan karakter , etika profesi dan transformasi digital bagi guru PNF	kegiatan			-	1	40.000.000		40.000.000		-	1	40.000.000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
KP. 2	Peningkatan Sarana & Prasarana Teknologi Informasi Sekolah	jumlah sekolah yang ditingkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi	sekolah													
	AP 1.pengadaan perangkat teknologi informasi	jumlah perangkat teknologi informasi yang disediakan	unit				1	200.000.000	1	200.000.000		-	1	200.000.000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
KP. 3	Sekolah Unggulan sebagai Model Pendidikan Berkualitas	jumlah SD unggulan	sekolah		7		7		7							
		jumlah SMP unggulan	sekolah		7		7		7							

NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	AP 1. Revitalisasi Infrastruktur Sekolah unggulan/rintisan sekolah unggulan	jumlah infrastruktur SD Unggulan yang direvitalisasi	unit		14	2.800.000.000		2.800.000.000		1.400.000.000		-			1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
															1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		jumlah infrastruktur SMP Unggulan yang direvitalisasi	unit		14	2.800.000.000	14	2.800.000.000	12	1.400.000.000		-			1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		-													1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
		jumlah peralatan teknologi SD Unggulan yang tersedia	unit				1	70.000.000	1	70.000.000		-			1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		jumlah peralatan teknologi SMP unggulan yang tersedia	unit				1	70.000.000	1	70.000.000		-			1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	AP 2. Peningkatan SDM Guru dan Kepala Sekolah Unggulan/Rintisan Sekolah Unggulan	- jumlah kepala SD Unggulan/Rintisan Sekolah Unggulan yang mendapatkan Pelatihan lanjutan	orang		7	70.000.000	7	70.000.000				-			1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		- jumlah kepala SMP Unggulan/Rintisan Sekolah Unggulan yang mendapatkan Pelatihan lanjutan	orang		7	70.000.000	7	70.000.000		-		-		-	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- jumlah guru SD Unggulan/Rintisan Sekolah Unggulan yang mendapatkan Pelatihan lanjutan	orang		42	105.000.000	42	105.000.000	42	105.000.000		-			1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		- jumlah guru SMP Unggulan/Rintisan Sekolah Unggulan yang mendapatkan Pelatihan lanjutan	orang		42	105.000.000	42	105.000.000	42	105.000.000		-			1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		jumlah sekolah unggulan/rintisan sekolah unggulan yang memiliki media promosi aktif	sekolah		14	14.000.000	14	14.000.000		-		-		-	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
KP. 4	Program Apresiasi "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi	jumlah siswa yang menerima fasilitasi dan apresiasi	siswa		60		1072		71		71		71			
	AP 1. Penyaluran Beasiswa sesuai data verifikasi calon penerima untuk siswa berprestasi	- Jumlah siswa SD Penerima beasiswa berprestasi	orang		30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		- Jumlah siswa SMP Penerima beasiswa berprestasi	orang		30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
	AP 2. Fasilitasi & Apresiasi Siswa Berprestasi (tingkat provinsi & nasional)	jumlah lomba yang difasilitasi dan diapresiasi SD	lomba				5	104.500.000	5	104.500.000	5	104.500.000	5	104.500.000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		jumlah lomba yang difasilitasi dan diapresiasi SMP	lomba				6	88.000.000	6	88.000.000	6	88.000.000	6	88.000.000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa



NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		jumlah lomba yang difasilitasi dan diapresiasi SMA	lomba					121.000.000		121.000.000		121.000.000		121.000.000	Bukan kewenangan	
KP. 5	Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter di Sekolah	jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum yang berbasis karakter	sekolah				500									
	AP 1. Penyusunan Modul siswa Demak Berakhlak	jumlah Modul karakter lokal berbasis budaya dan nilai agama	modul				1	100.000.000		-		-		-	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	AP 2. Pelatihan Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah yang terlatih dengan Metode integrasi nilai karakter dalam pembelajaran	kepala sekolah				500	67.200.000		-		-		-	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PP.5	Demak Mantap															
KP. 4	Pengembangan Fasilitas Pendidikan - Demak Cerdas	jumlah sekolah yang dikembangkan fasilitasnya	sekolah				14		14		14		14			
	AP 1. Revitalisasi Infrastruktur SD	jumlah infrastruktur SD yang direvitalisasi	paket				3	600.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	1.250.000.000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	AP 2. Revitalisasi Infrastruktur SMP	jumlah infrastruktur SMP yang direvitalisasi	paket				3	600.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	1.250.000.000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	AP 3. Revitalisasi Infrastruktur TK	jumlah infrastruktur TK yang direvitalisasi	paket				2	400.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.000.000.000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah



NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	AP 4. Revitalisasi Infrastruktur PNF/Kesetaraan	jumlah infrastruktur PNF/Kesetaraan yang direvitalisasi	paket				2	400.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.000.000.000	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	AP 5. Pengadaan sarana pembelajaran	- Jumlah Pengadaan sarana pembelajaran SD	paket				1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		- Jumlah Pengadaan Pengadaan sarana pembelajaran SMP	paket				1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		- Jumlah Pengadaan Pengadaan sarana pembelajaran TK	paket				1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
		- Jumlah Pengadaan Pengadaan sarana pembelajaran PNF/Kesetaraan	paket				1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
PP 6	Demak Tangguh dan Lestari															
KP. 1	Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi	jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan akses layanan dasar perumahan dan pendidikan	orang													
-	AP 2. Penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk siswa Miskin dan Disabilitas	- Jumlah siswa SD Penerima beasiswa miskin	orang		2550	2.550.000.000	2550	2.250.000.000	2550	2.250.000.000	2550	2.000.000.000	2550	2.250.000.000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

NO	PP/KP	INDIKATOR	SATUAN	Data Awal 2024	Target										Kode	Sub. Kegiatan
					2026		2027		2028		2029		2030			
				Kinerja	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	-	- Jumlah siswa SMP Penerima beasiswa miskin	orang		1533	2.299.500.000	1533	2.099.500.000	1533	2.099.500.000	1533	1.800.000.000	1533	2.099.500.000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
	-	- Jumlah siswa PAUD Penerima beasiswa miskin	orang		896	350.000.000	896	350.000.000	896	350.000.000	696	200.000.000	696	200.000.000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
	-	- Jumlah siswa PNF/Kesetaraan Penerima beasiswa miskin	orang		987	1.201.250.000	987	1.201.250.000	987	1.201.250.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
	-	- Bantuan sosial untuk siswa disabilitas	paket					-	20	90.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah



4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan urusan wajib pendidikan dan Kebudayaan . Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (kepmen pemutakhiran)

**Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					786.183.473.820		800.062.152.962		797.017.311.895		796.091.684.417		804.436.708.165	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					786.183.473.820		800.062.152.962		797.017.311.895		796.091.684.417		804.436.708.165	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					592.646.042.103		603.396.434.585		607.323.248.236		611.158.580.023		615.087.815.127	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dindikbud (Dengan Satuan:Angka)	80,60	80,63	80,73		80,83		80,93		81,36		81,88		SEKRETARIS
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	J u m l a h d o k u m e n perencanaan, dan evaluasi kinerja daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7		7		7		7		7		7		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4		4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				588.747.011.703		599.760.688.585		603.612.502.236		607.502.834.023		611.432.069.127		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				574.881.022.171		578.694.699.053		582.546.512.704		586.436.844.491		590.366.079.595		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	6284		6284		6284		6284		6284		6284		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13.800.989.532		21.000.989.532		21.000.989.532		21.000.989.532		21.000.989.532		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada PD yang dilaporkan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				400.000.000		475.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				325.000.000		400.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	110		110		110		110		110		110		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- U n d a n g a n (D e n g a n Satuan:Orang)	50		50		50		50		50		50		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.823.035.600		1.847.235.600		1.847.235.600		1.847.235.600		1.847.235.600		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					54.216.200		54.216.200		54.216.200		54.216.200		54.216.200	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					119.536.700		119.536.700		119.536.700		119.536.700		119.536.700	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					73.633.700		73.633.700		73.633.700		73.633.700		73.633.700	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					76.609.000		76.609.000		76.609.000		76.609.000		76.609.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10		2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					600.000.000		624.200.000		624.200.000		624.200.000		624.200.000	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6		6		6		6		6		6		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.640.000		35.640.000		35.640.000		35.640.000		35.640.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3		3		3		3		3		3		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				363.484.400		163.484.400		163.484.400		163.484.400		163.484.400		
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (Dengan Satuan:Paket)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		50.000.000		0		0		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		1		0		0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		0		0		0		50.000.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		0		0		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.984.400		104.984.400		54.984.400		54.984.400		54.984.400		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20		20		20		20		20		20		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		0		0		0		0		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		1		0		0		0		0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.500.000		58.500.000		58.500.000		58.500.000		58.500.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10		5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		50.000.000		0		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		0		1		0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				945.026.000		945.026.000		945.026.000		945.026.000		945.026.000		
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				890.026.000		890.026.000		890.026.000		890.026.000		890.026.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.484.400		110.000.000		260.000.000		205.000.000		205.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Dengan Satuan:Paket)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	59		59		60		60		60		60		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		25.000.000		25.000.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		0		50		50		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	50		0		0		20		20		20		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					162.724.400		0		50.000.000		0		0	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi i (Dengan Satuan:Unit)	10		10		0		5		0		0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.760.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3		3		3		3		3		3		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0			0		50.000.000		0		0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3		0		0		5		0		0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				192.232.431.717			195.120.718.377		188.149.063.659		183.478.104.394		187.803.893.038	
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	80,19	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	99,67	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD DAN SMP
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Dengan Satuan:%)	99,20	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD DAN SMP
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	18,77	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				106.831.429.800			109.112.499.800		105.650.179.800		103.500.179.800		105.200.179.800	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Dengan Satuan:%)	92,92		93,42		93,92		94,42		94,92		95,42		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				500.000.000			500.000.000		500.000.000		0		500.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		5		5		5		0		5		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.000 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.000 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					200.000.000		840.000.000		0		0		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	8		2		8		0		0		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.000 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	37		5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.000 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					300.000.000		300.000.000		0		300.000.000		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	4		2		2		0		2		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.001 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					100.000.000		100.000.000		0		200.000.000		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	1	1	1		1		0		2		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.001 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					2.814.000.000		2.814.000.000		1.400.000.000		0		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	4		8		8		4		0		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.001 4	Pengadaan Mebel Sekolah					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	20		5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0		104.500.000		104.500.000		104.500.000		104.500.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	770		0		770		770		770		770		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.002 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					249.000.000		289.000.000		267.241.800		237.241.800		237.241.800	KEPALA SEKSI GTK SD
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	955		955		955		955		955		955		KEPALA SEKSI GTK SD
1.01.02.2.01.002 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					175.000.000		175.000.000		105.000.000		0		0	KEPALA SEKSI GTK SD
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	202		202		202		202						KEPALA SEKSI GTK SD
1.01.02.2.01.002 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					0		200.000.000		200.000.000		0		200.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	296				296		296				296		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.002 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					95.013.438.000		95.013.438.000		95.013.438.000		95.013.438.000		95.013.438.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	490		490		490		490		490		490		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.003 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	45		45		45		45		45		45		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.003 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				900.000.000			900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Di b a n g u n (D e n g a n Satuan:Ruang)	2		8		8		8		8		8		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.003 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				225.000.000			225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		3		3		0		3		3		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.003 5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0			30.000.000		0		0		0	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:Orang)	0		0		100		0		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.003 6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				0			0		45.000.000		0		0	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Dengan Satuan:Konten Digital)	0	0	0		0		100		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.003 8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				194.991.800			131.561.800		100.000.000		150.000.000		100.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:Dokumen)	4		4		4		4		4		4		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.004 1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Komunitas)	0	0	0		2		2		2		2		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.004 3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terlaksananya layanan dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Dengan Satuan:Kegiatan)	0		1		1		1		1		1		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.004 6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	0		0		100		100		100		100		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.004 7	Pembangunan Ruang Kelas Baru				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	5		2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.004 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		1.000.000.000		0		0		1.000.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	0		1		5		0		0		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.01.005 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	490		490		490		490		490		490		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.005 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		600.000.000		800.000.000		800.000.000		1.250.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	6		0		6		8		8		10		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.2.01.005 4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					2.640.000.000		2.340.000.000		2.340.000.000		2.090.000.000		2.090.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	2550	2550	2550		2550		2550		2550		2550		KETUA TIM PEMBINAAN SD (SUB KOR)
1.01.02.2.01.005 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					0		170.000.000		270.000.000		100.000.000		200.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	25		0		25		25		25		25		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					44.180.750.000		45.320.717.160		44.137.632.442		42.530.750.000		43.730.750.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Dengan Satuan:%)	77,19		77,69		78,19		78,69		79,19		79,69		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0		0		250.000.000		250.000.000		250.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	1		0		0		1		1		1		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.000 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					0		100.000.000		0		100.000.000		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		1		0		1		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.000 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					0		0		100.000.000		0		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		0		1		0		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.000 6	Pembangunan Laboratorium					0		600.000.000		0		600.000.000		585.500.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		3		0		3		3		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 1	Pembangunan Kantin Sekolah					0		0		0		50.000.000		0	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		0		1		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		300.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	10		1		2		1		1		1		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.800.000.000		3.400.000.000		2.200.000.000		800.000.000		1.250.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	10		10		12		8		4		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		400.000.000		400.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		0		0		5		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0		400.000.000		400.000.000		0		400.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		5		5		0		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				0		0		0		415.500.000		400.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		0		0		5		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.001 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				0		0		400.000.000		0		400.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		0		5		0		5		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.002 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				0		0		80.000.000		0		80.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0		2		0		2		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.002 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	2		2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.002 5	Pengadaan Mebel Sekolah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	3		7		7		7		7		7		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.003 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				2.419.500.000		2.309.500.000		2.309.500.000		2.010.000.000		2.010.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	1533	1533	1533		1533		1533		1533		1533		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.003 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0		88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	300		300		300		300		300		300		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.003 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0		0		319.000.000		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dengan Satuan:Orang)	319		0		0		319		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
1.01.02.2.02.004 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				175.000.000		175.000.000		105.000.000		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	657		657		657		657		0		0		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
1.01.02.2.02.004 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	86		86		86		86		86		86		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.004 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					34.947.250.000		34.947.250.000		34.947.250.000		34.947.250.000		34.947.250.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	86		86		86		86		86		86		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.004 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dengan Satuan:Orang)	86		86		86		86		86		86		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.004 8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					0		0		50.000.000		0		0	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:Orang)	0		0		0		50		0		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.004 9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					0		0		50.000.000		0		0	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Dengan Satuan:Konten Digital)	0	0	0		0		50		0		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.2.02.005 1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		1		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.005 4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					0		0		18.882.442		0		20.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Komunitas)	0	0	0		0		1		0		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.005 5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					50.000.000		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Dengan Satuan:Kegiatan)	0		1		0		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.005 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					250.000.000		250.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Terlaksananya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	86		87		87		87		87		87		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.005 9	Pembangunan Ruang Kelas Baru					200.000.000		630.967.160		0		200.000.000		200.000.000	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	0		1		2		0		1		1		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.006 0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					0		0		0		20.000.000		0	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0		0		0		1		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				69.000.000		0		50.000.000		50.000.000		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	200		1		0		1		1		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.02.2.02.006 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.000.000.000		0		0		0		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		8		0		0		0		0		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.02.006 7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				170.000.000		170.000.000		270.000.000		100.000.000		200.000.000		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	3		3		3		3		3		3		KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD DAN SMP
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				32.212.174.217		30.478.173.717		29.478.173.717		28.865.346.894		29.143.923.717		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	ANGKA PARTISIPASI MURNI(APM) PAUD (Dengan Satuan:%)	88,72		88,75		88,80		88,85		88,90		88,95		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.000 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1.794.000.000		1.794.000.000		0		0		50.750.000		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	12		10		10		0		0		1		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.000 7	Pengadaan Mebel PAUD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	14		4		4		4		4		4		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.000 9	Pengadaan Perlengkapan PAUD				200.000.000		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	100		100		0		100		100		100		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.001 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		200.000.000		200.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	896		896		896		896		896		896		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.001 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				200.000.000		0		0		0		0		KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Dengan Satuan:Orang)	20		20		0		0		0		0		KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF
1.01.02.2.03.001 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				2.484.600.000		1.130.522.000		1.269.600.000		656.773.177		484.600.000		KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	2157		2157		2157		2157		2157		2157		KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF
1.01.02.2.03.001 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				883.000.000		883.000.000		883.000.000		883.000.000		883.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	923		923		923		923		923		923		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.001 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD				23.895.072.000		23.895.072.000		23.895.072.000		23.895.072.000		23.895.072.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	923		923		923		923		923		923		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.001 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dengan Satuan:Orang)	923		923		923		923		923		923		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.002 2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50.000.000		50.000.000		0		50.000.000		50.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:Orang)	56		56		56		0		56		56		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.002 5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:Dokumen)	2		2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.002 8	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	1		2		2		2		2		2		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.003 0	Pembangunan Ruang Kelas Baru				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	1		2		2		2		2		2		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.003 4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				161.579.717		161.579.717		161.579.717		161.579.717		161.579.717		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta didik)	280		280		280		280		280		280		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.2.03.003 7	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					50.000.500		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Dengan Satuan:Kegiatan)	4		4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.004 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	1000		1000		1000		1000		1000		1000		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.02.2.03.004 4	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus					154.922.000		150.000.000		154.922.000		154.922.000		154.922.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		2		2		2		2		2		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.004 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					375.000.000		250.000.000		150.000.000		350.000.000		250.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Bera	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	5		5		5		5		5		5		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.004 6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					0		100.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	28		0		28		28		28		28		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.004 7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	140		140		140		140		140		140		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.2.03.004 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		2		2		2		2		2		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.004 9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					300.000.000		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Dengan Satuan:Ruang)	2		5		0		5		5		5		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.005 0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		1		1		1		1		1		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.03.005 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					0		400.000.000		600.000.000		600.000.000		1.000.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	2	2	0		2		2		2		2		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					9.008.077.700		10.209.327.700		8.883.077.700		8.581.827.700		9.729.039.521	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) PNF/Kesetaraan (Dengan Satuan:%)	64,74		64,74		64,74		64,80		64,80		64,80		KEPALA S EKSIPEMBIN AAN PNF/KESETARAA N
1.01.02.2.04.001 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					1.201.250.000		1.201.250.000		1.201.250.000		1.000.000.000		1.000.000.000	KEPALA S EKSIPEMBIN AAN PNF/KESETARAA N
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	987	987	987		987		987		987		987		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.001 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					12.000.000		0		0		0		0	KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Orang)	12	12	12		0		0		0		0		KEPALA SEKSI GTK PAUD DAN PNF
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					214.250.000		214.250.000		214.250.000		214.250.000		214.250.000	KEPALA SEKSI EKSPERIMENTASI PNF/KESETARAAN
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	50		50		50		50		50		50		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					5.729.310.000		5.729.310.000		5.729.310.000		5.729.310.000		5.729.310.000	KEPALA SEKSI EKSPERIMENTASI PNF/KESETARAAN
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	25	25	29		29		29		29		29		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					48.267.700		48.267.700		48.267.700		48.267.700		48.267.700	KEPALA SEKSI EKSPERIMENTASI PNF/KESETARAAN
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Orang)	50		50		50		50		50		50		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					75.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI EKSPERIMENTASI PNF/KESETARAAN
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:Orang)	50		50		50		50		50		50		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KEPALA SEKSI EKSPERIMENTASI PNF/KESETARAAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:Dokumen)	2		2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.002.8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				100.000.000			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.003.1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				90.000.000			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Dengan Satuan:Kegiatan)	40		40		40		40		40		40		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.003.5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				100.000.000			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	280		280		280		280		280		280		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.003.6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0			150.000.000		0		0		0	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	0		0		3		0		0		0		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.003.7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				88.000.000			200.000.000		0		0		0	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Dengan Satuan:Buku)	0		2		5		0		0		0		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.2.04.003 8	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					300.000.000		376.250.000		0		0		0	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Ruang)	0		3		3		0		0		0		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.003 9	Pembangunan Ruang Kelas Baru					400.000.000		500.000.000		0		0		506.838.979	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	0		4		5		0		0		5		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.004 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0		400.000.000		600.000.000		600.000.000		1.000.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	1	1	0		4		6		6		10		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.004 6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Dengan Satuan:Peserta Didik)	1500		1500		1500		1500		1500		1500		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNF/KESETARAAN
1.01.02.2.04.004 8	Pengadaan Mebel Sekolah					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	1		4		4		4		4		4		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.005 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal					0		0		0		0		140.372.842	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:unit)	2		0		0		0		0		1		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.005 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan					0		100.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	14		0		2		4		2		4		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.02.2.04.006 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0			400.000.000		0		0		0	KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0		0		2		0		0		0		KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF (SUBKOR)
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
	Meningkatnya kurikulum berbasis karakter	Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan (Dengan Satuan:Kegiatan)	2		0		1		0		0		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.03.2.01.000 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0		100.000.000		50.000.000		0		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2		0		2		1		9		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.03.2.01.000 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					100.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Orang)	0		200		100		100		200		100		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
1.01.03.2.01.000 7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					50.000.000		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0		1		0		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMP

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non F o r m a l (D e n g a n Satuan:Kegiatan)	0		0		1		0		0		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang T e r s u n (D e n g a n Satuan:Dokumen)	0		0		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.155.000.000		1.245.000.000		1.245.000.000		1.155.000.000		1.245.000.000	
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikat Profesi (Dengan Satuan:%)	67.78	67.80	67.82		67.84		67.86		67.88		67.90		KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Dengan Satuan:Angka)	0.74	0.74	0.78		0.81		0.84		0.87		0.89		KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.155.000.000		1.245.000.000		1.245.000.000		1.155.000.000		1.245.000.000	
	Terlaksananya Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar	Indeks Pemerataan Guru (Dengan Satuan:Angka)	100	100	100		100		100		100		100		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.04.2.01.000 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.140.000.000		1.230.000.000		1.230.000.000		1.140.000.000		1.230.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, P A U D , d a n P e n d i d i k a n Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan P e n d i d i k a n Nonformal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Dokumen)	3		3		3		3		3		3		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
1.01.04.2.01.000 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, d a n P e n d i d i k a n Nonformal/Kesetaraan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan P e n d i d i k a n Nonformal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	2		2		2		2		2		2		KETUA TIM PEMBINAAN GTK SMP (SUBKOR)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.284.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.284.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		2.344.696.88 3		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000	
	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir* (Dengan Satuan:%)	18,25	18,96	19,39		19,82		20,25		20,68		21,11		K E P A L A D I N A S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang mendukung pengelolaa WBTB (Dengan Satuan:Kegiatan)	1		1		1		1		1		1		KETUA TIM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.02.2.01.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	4		4		4		4		4		4		KETUA TIM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.01.000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					207.000.000		207.000.000		207.000.000		207.000.000		207.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Dengan Satuan:Orang)	60		60		60		60		60		60		KETUA TIM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000	
	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian (Dengan Satuan:event)	4		4		4		4		4		4		KETUA TIM PEMBINAAN KESENIAN DAERAH
2.22.02.2.02.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN KESENIAN DAERAH
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	4		4		4		4		4		4		KETUA TIM PEMBINAAN KESENIAN DAERAH
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	18,15	18,21	18,97		19,74		20,50		21,26		22,02		KEPALA BIDANG P E M B I N A A N KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang mendukung penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabi Kota (Dengan Satuan:Kegiatan)	1		2		2		2		2		2		KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.05.2.01.000 2	Penetapan Cagar Budaya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	2		2		2		2		2		2		KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	obyek Cagar Budaya yang dilestarikan. (Dengan Satuan:Kegiatan)	3		2		2		2		2		2		KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.02.000 1	Pelindungan Cagar Budaya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)	2		1		1		1		1		1		KETUA TIM PEMBINAAN SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					674.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883	
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum (Dengan Satuan:%)	10	11	12		14		16		17		18		KEPALA BIDANG P E M B I N A A N KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					674.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883	
	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		5		5		KEPALA UPT MUSEUM
2.22.06.2.01.000 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					191.466.000		191.466.000		191.466.000		191.466.000		191.466.000	KEPALA UPT MUSEUM
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Dengan Satuan:Unit)	4		4		4		4		4		4		KEPALA UPT MUSEUM
2.22.06.2.01.000 2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					106.696.883		106.696.883		106.696.883		106.696.883		106.696.883	KEPALA UPT MUSEUM
	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	40		40		40		40		40		40		KEPALA UPT MUSEUM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.06.2.01.000 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					376.534.000		376.534.000		376.534.000		376.534.000		376.534.000	KEPALA UPT MUSEUM
	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Dengan Satuan:Unit)	4		4		4		4		4		4		KEPALA UPT MUSEUM
2.22.06.2.01.000 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	KEPALA UPT MUSEUM
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	2		0		2		2		2		2		KEPALA UPT MUSEUM
TOTAL:						788.468.170.703		802.406.849.845		799.362.008.778		798.436.381.300		806.781.405.048	

2025-09-01



4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,53	86,04	86,04	86,55	87,06	87,57	88,08	
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,60	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	
3	Literasi Membaca SD/Sederajat*	%	85,53	87,08	87,86	88,63	89,41	90,18	90,96	
4	Literasi Membaca SMP/Sederajat*	%	78,82	81,26	82,58	83,9	85,22	86,54	87,86	
5	Numerasi SD/Sederajat*	%	78,62	82,68	84,6	86,52	88,44	90,37	92,29	
6	Numerasi SMP/Sederajat*	%	74,42	78,49	80,53	82,56	84,6	86,63	88,67	
7	Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun	%	91,08	92,92	93,42	93,92	94,42	94,92	95,42	
8	Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun	%	74,69	77,19	77,69	78,19	78,69	79,19	79,69	
9	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	

**Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	80,19	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,67	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,2	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,77	100	100	100	100	100	100

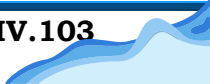


Bab 4 Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Iklm keamanan SD	Angka	72,90	74,81	75,61	76,41	77,21	78,01	78,81
6	Iklm keamanan SMP	Angka	66,07	69,81	70,61	71,41	72,21	73,01	73,81
7	Iklm kebhinekaan SD	Angka	74,06	73,83	74,63	75,43	76,23	77,03	77,83
8	Iklm kebinekaan SMP	Angka	72,01	71,91	72,71	73,51	74,31	75,11	75,91
9	Iklm inklusivitas SD	Angka	56,14	60,17	60,97	61,77	62,57	63,37	64,17
10	Iklm inklusivitas SMP	Angka	55,35	58,17	58,97	59,77	60,57	61,37	62,17
11	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	82,31	82,81	83,31	83,81	84,31	84,81	85,31



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
P	KEBUDAYAAN								
87	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	66,67	100	100	100	100	100	100





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

Lampiran-lampiran

